

ABSTRAK

Berubahnya perilaku masyarakat dalam memenuhi gaya hidup konsumtif karena berkembangnya teknologi berimbas kepada banyaknya pelaku usaha jasa titipan yang melakukan kegiatan usaha bertentangan dengan peraturan. Mereka sering memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk, padahal seharusnya fasilitas tersebut tidak dapat digunakan oleh pelaku usaha. Pelaku jasa titipan juga merugikan pengusaha retail dalam negeri karena persaingan tidak sehat, serta merugikan negara karena tidak terpenuhinya bea masuk dan pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha jasa titipan dihubungkan dengan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titipan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian, deskriptif analitis yang memberikan gambaran penyelundupan yang dilakukan pelaku usaha jasa titipan. Tahap penelitian, studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Teknik pengumpulan data, studi dokumen yang dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan. Serta, analisis data, yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku jasa titipan seringkali tidak diterapkan berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dikarenakan adanya faktor penyebab pasal tersebut tidak dapat diterapkan seperti unsur pasal yang tidak terpenuhi atau kurangnya barang bukti. Untuk menanggulangi penyelundupan yang dilakukan pelaku jasa titipan, dilakukan upaya preventif dan represif oleh bea cukai. Penegakan hukum terhadap pelaku jasa titipan harus ditegakkan sesuai ketentuan yang ada dengan mengacu kepada Undang-Undang Kepabeanan khususnya Pasal 102 terkait dengan penyelundupan dibidang impor sehingga dapat memberikan efek jera, serta untuk menanggulangi penyelundupan, diperlukan sosialisasi lebih giat lagi dan dukungan dari masyarakat khususnya pelaku usaha jasa titipan.

ABSTRACT

Changes in people's behavior in fulfilling the consumptive lifestyle conducting business activities contrary to the regulations. They often take advantage of import duty exemption facility, even though the business people shouldn't have used the facility. Custodian service actors also harm domestic retail entrepreneurs because of unfair competition, and cause losses to the state because import duties and other taxes are not fulfilled. This study aims to determine and analyze how law enforcement against entrusted business actors in relation to Article 102 of Law number 17 of 2006 concerning Amendments to Law number 10 of 1995 concerning customs and the efforts made to tackle smuggling carried out by business actors on entrusted services.

The research method used is normative juridical with research specifications, analytical descriptive which provides an overview of smuggling carried out by entrusted business actors. The research stage used literature study with primary legal materials that's Law number 17 of 2006 concerning Amendments to Law number 10 of 1995 concerning customs. Data collection techniques, document studies carried out by understanding books and laws and regulations. As well as, data analysis, juridical qualitative, namely research that refers to legal norms contained in various laws and regulations.

The study results indicate that law enforcement against custodians is often not implemented based on Article 102 of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, due to factors that cause these articles cannot be applied such as the elements of the articles which not fulfilled or lack of evidence. To tackle the smuggling carried out by custodians, preventive and repressive efforts are made by customs. Law enforcement against entrusted service actors must be enforced according to existing provisions with reference to the Customs Law, especially Article 102 related to smuggling in the import sector so that it can provide a deterrent effect, and to tackle smuggling, more active socialization and support from the community, especially business actors that is custodian service, are needed.